



## **Kebijakan *National Sword*: Respons Tiongkok Dalam Menghadapi Impor Limbah Bahan Baku**

**Wahyu Setyo Wicaksono, Mohamad Rosyidin, Marten Hanura**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Rapid economic growth in the People's Republic of China is caused by many factors. One of the factors is the high number of products exports in which the products come from imported waste raw materials. Unfortunately, the high number of waste raw materials used in the products-processing activities have caused ecological problems in China. These environmental problems have also caused consequential threats to the livelihood of Chinese citizens. This prompted the Chinese Government to ensure its intention to overcome the ecological problems that occurred in China by imposing National Sword Policy. Using the concept of human security, this research aims to explain the factors behind the Chinese Government's decision to impose the National Sword Policy. This research also tries to explain how the concept of human security plays a significant role in influencing the Chinese Government's decision to create National Sword Policy. At the end of this research, the author conveys the result of the research that reveals that the National Sword Policy, created by the Chinese Government, is mainly influenced by the concept of human security and the Chinese Government's idea of peaceful development.*

**Keywords:** *China, imports of raw material waste, National swords, human security, environmental problems.*

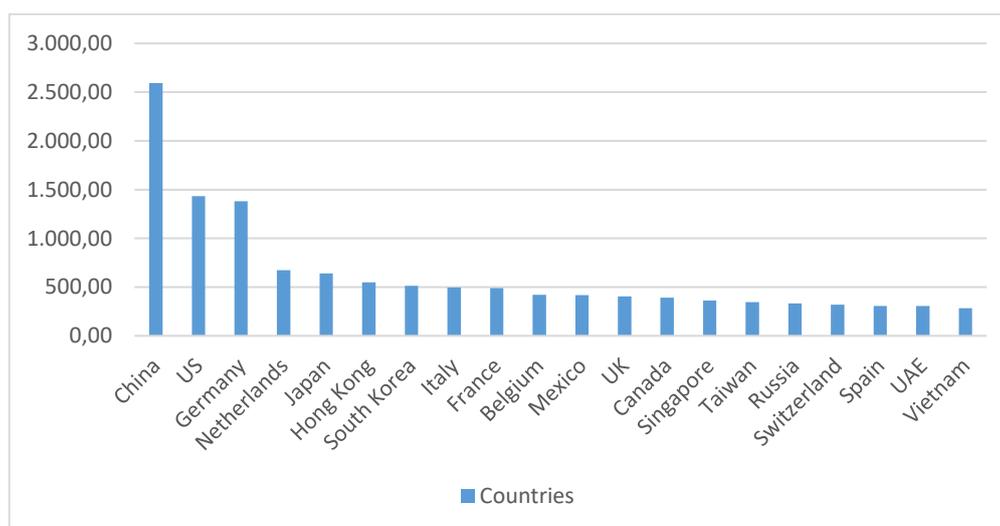
### **PENDAHULUAN**

Era globalisasi di abad 21, setiap negara perlu menjalankan sistem perekonomian yang terbuka dengan negara lain dengan cara membuka diri dalam perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan perlunya penghubung perekonomian di antara negara satu dengan negara lainnya yang mana keterbukaan tersebut disebabkan oleh kemampuan setiap negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akibat adanya interdependensi ekonomi yang semakin kuat. Maka dari itu, sebuah negara perlu memikirkan perkembangan perekonomian negaranya dengan memanfaatkan hubungan antar-negara dalam meningkatkan perekonomian negaranya. Dengan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, diharapkan hal tersebut dapat memperlancar pembangunan ekonomi di negara tersebut serta memberikan keuntungan dengan tersedianya pasar yang luas untuk kebutuhan ekspor dan impor. Hal ini lumrah terjadi di semua negara demi kepentingan negaranya, sehingga adanya pemanfaatan hubungan antar-negara oleh suatu negara dapat membuat pertumbuhan ekonomi negara bisa

meningkat (Asbiantari, Hutagaol, & Asmara, 2016). Salah satu contohnya adalah hubungan antara negara-negara di Eropa dan Republik Rakyat Tiongkok.

Tiongkok ialah salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya berjalan dengan pesat dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Pertumbuhan yang signifikan tersebut diakibatkan oleh produksi barang – barang murah dari Tiongkok yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di Tiongkok. Hal tersebut membuat Tiongkok menjadi negara dengan pengekspor barang-barang terbesar di dunia.

**Grafik 1.** Negara Dengan Pengekspor Terbesar Di Dunia Tahun 2020 (Dalam Milliar US\$)



Sumber: (Statista, 2021)

Kebijakan Tiongkok untuk melakukan impor limbah bahan baku industri tersebut tidak terlepas dari adanya sektor manufaktur yang berkembang dengan pesat. Selain itu, sektor bisnis menganggap ini sangat menguntungkan dikarenakan negara yang mengekspor membiayai pengiriman limbah bahan baku ke Tiongkok (Nugraha, 2019). Kebijakan impor limbah tersebut tentunya memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Tiongkok. Tiongkok sendiri sejak tahun 1990 hingga 2016 merupakan salah satu negara dengan pengimpor limbah bahan baku daur ulang di mana dalam rentang waktu tersebut, angka impor limbah yang dilakukan Tiongkok meningkat sepuluh kali lipat dari yang sebelumnya hanya berjumlah 4,5 juta ton menjadi 45 juta ton (Ritchie, 2018, p. 5). Jumlah limbah yang diekspor ke Tiongkok tersebut telah “mewakili” 50 persen limbah bahan daur ulang di dunia. Terdapat korelasi antara impor limbah yang dilakukan Tiongkok dengan keuntungan yang diraihnya. Semakin besar impor limbah bahan baku yang dikirim oleh Tiongkok, maka akan semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh Tiongkok. Tercatat bahwa dari tahun 1988 – 2016, nilai perdagangan akibat melakukan impor yang dilakukan oleh Tiongkok sebesar 57,6 juta US\$ (Brooks, Wang, & Jambeck, 2018). Sehingga Peningkatan tersebut tentunya sangat membantu dalam peningkatan perekonomian di Tiongkok.

Namun, kebijakan yang membawa keuntungan besar bagi Tiongkok tersebut dihentikan pada tahun 2018. Pada tanggal 1 Januari 2018, Pemerintah Tiongkok secara resmi mengeluarkan kebijakan pelarangan impor yang dinamakan *National Sword China Policy*. Kebijakan tersebut ialah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok guna melarang impor limbah bahan baku industri dari berbagai negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok tersebut membuat sektor perdagangan impor limbah bahan baku daur ulang di seluruh dunia terguncang dan kebingungan, khususnya negara - negara yang mengekspor limbah bahan baku daur ulangnya ke Tiongkok seperti Amerika Serikat yang merupakan negara dengan pengekspor limbah bahan baku paling banyak dengan jumlah limbah yang hampir mencapai 700.000 ton per tahun. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan impor bahan daur ulang dari negara maju secara drastis di Tiongkok.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab sebuah pertanyaan kunci: Mengapa Pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan National Sword dan penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik yaitu; Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pemerintah Tiongkok menggagas kebijakan National Sword? Dan Bagaimana konsep *human security* berperan dalam pembuatan kebijakan National Sword oleh Pemerintah Tiongkok? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan perspektif *human security*. Konsep *human security* menjelaskan bahwa konsep ini merupakan reaksi pada persoalan kemanusiaan yang ada saat ini. Dalam UNDP terdapat tujuh (7) komponen di dalam *human security* yang pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah, antara lain ialah; *personal security, community security, food security, economic security, environmental security, health security dan political security*. Hal demikian dapat menciptakan kebebasan dan keamanan dari ketakutan dan juga pencapaian kesejahteraan pada aspek kehidupan manusia baik rasa aman dari ancaman bahaya kronis maupun perlindungan dari gangguan kekacauan yang tidak dididuga dan menyakitkan kehidupan sehari – hari. Dari penjelasan diatas konsep yang berhubungan kebijakan *national sword* adalah *environmental security, health security dan political security*. Di mana kebijakan ini merupakan kebijakan dalam mengatasi permasalahan limbah sehingga dengan penggunaan konsep *human security* dapat menganalisis permasalahan melalui ancaman yang berkaitan pada manusia. Penelitian ini akan secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Tiongkok melakukan pelarangan impor limbah bahan baku daur ulang.

## **PEMBAHASAN**

Kebijakan ini impor bermula sekitar tahun 1990 dimana pada saat itu terjadi perkembangan yang pesat di aspek ekonomi dan standar hidup, sehingga Tiongkok disebut sebagai “*foreign trash*” dikarenakan limbah negara – negara banyak dikirim ke Tiongkok. Hal ini dikarenakan lebih dari 50 persen sampah daur ulang dunia di ekspor menuju Tiongkok. Tingginya impor tersebut digunakan dan dijadikan produk produk baru yang kemudian dijual. Selain itu peran Tiongkok menjadi produsen serta eksportir tekstil dan pakaian terbesar di dunia, menjadikan kebutuhan juga meningkat terutama dalam berbagai macam limbah bahan baku. Industri tekstil dan pakaian merupakan salah satu industri yang produktif bagi meningkatnya perekonomian Tiongkok. Tercatat bahwa tahun 2015, industri tersebut menyumbang sekitar 7% dari US\$11,06 triliun PDB negara Tiongkok (Irun, 2017, p. 7; Hanger-Kopp, Lieu, & Nikas, 2019, p. 159).

Adanya impor limbah bahan baku pada dasarnya memang menimbulkan baik dampak positif ataupun negatif. Dampak positifnya, kesejahteraan Tiongkok di sektor perdagangan meningkat cukup pesat. Namun tentunya hal itu juga menimbulkan dampak negatif khususnya di sektor lingkungan. Pasalnya impor limbah bahan baku yang dilakukan Tiongkok masih massif, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pengelolaan limbah yang akan diproduksi. Semakin tingginya impor yang dilakukan Tiongkok juga akan dibarengi dengan meningkatnya polusi dihadapi. Banyaknya fasilitas pengolahan limbah ini memiliki dampak buruk terhadap lingkungan karena

menyebabkan polusi di darat, air, dan udara di wilayah tersebut. Hal ini karena praktik yang dijalankan lebih mengedepankan kemurahan biaya daripada keselamatan seperti pembakaran, pembuangan terbuka, dan penggunaan bahan-bahan kimia yang merusak lingkungan (Li, et al., 2011, p. 3).

**Tabel 1.** Nilai Ekspor Tekstil dan Pakaian Tiongkok (dalam US\$)

Tahun	Nilai Ekspor
2006	138.093.880
2007	166.105.811
2008	179.734.024
2009	161.329.393
2010	199.534.310
2011	240.539.595
2012	246.094.186
2013	274.010.292
2014	287.645.387
2015	273.464.730
2016	138.093.880
2017	166.105.811

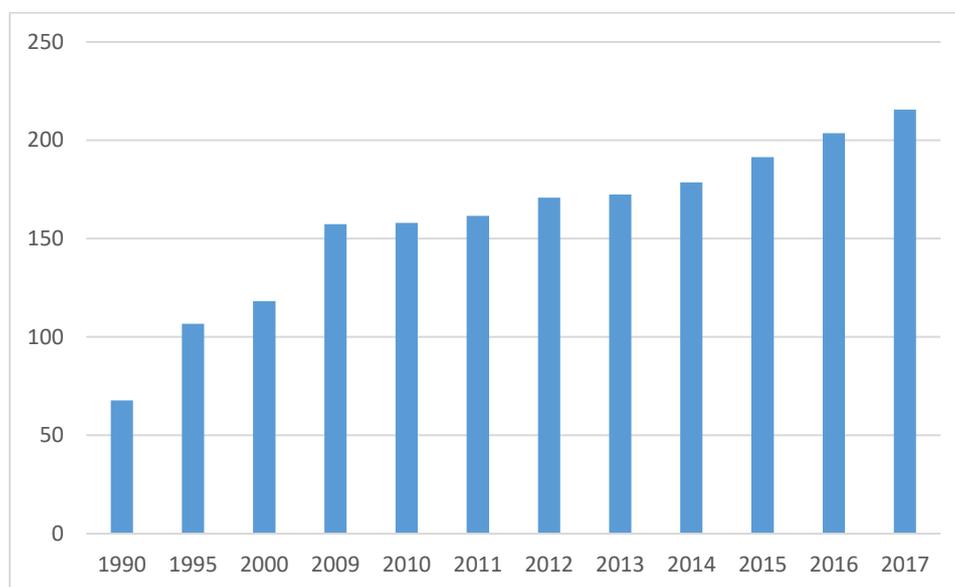
*Sumber: (World Integrate Trade Solution, 2018)*

Di tahun 2007, terdapat laporan bahwa banyak produk-produk yang telah dijual untuk di-recall karena terdapat bahan kimia berbahaya di dalamnya. Timbal yang berbahaya bagi manusia ditemukan di mainan anak-anak, di beberapa perhiasan, serta di kacamata untuk anak-anak. Dampak dari kebijakan impor limbah ini dapat dikatakan tidak merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mereka yang berasal dari kelas bawah dan kelompok marginal, seperti minoritas etnis dan agama, menjadi kelompok yang paling terdampak. Sebenarnya, proses daur ulang pada dasarnya menjadi proses yang amat penting dimana barang yang masih bisa dipakai dipergunakan kembali dalam rangka untuk pengurangan adanya polusi atau limbah. Sayangnya, Tiongkok tak melakukan proses daur ulang dengan baik dimana barang yang diterima tidak diolah dengan baik membuat semua jenis limbah padat baik yang kemudian bisa di daur ulang atau yang tak bisa akan berakhir di Tiongkok. Sedangkan limbah yang tak bisa di daur ulang condong untuk dilenyapkan dengan cara di buang atau dibakar.

Adanya peningkatan jumlah produksi sampah di Tiongkok mengakibatkan terjadinya kerusakan ekologi. Selain itu akibat banyaknya sampah di TPA telah menyebabkan banyaknya pencemaran polusi air, tanah dan udara dari kandungan kimia yang didapatkan dari limbah impor bahan baku dari berbagai Kota di Tiongkok akibat kegiatan Industri (Juan, 2016). Namun, Meskipun terdapat dampak positif dan negatif, Tiongkok tetap melakukan impor limbah disebabkan tiga (3) hal; terdapat tiga (3) alasan mengapa Tiongkok melakukan impor sampah plastik, pertama, dikarenakan adanya beberapa industri tekstil yang melihat bahwa produk limbah bahan baku dari luar negeri terdapat nilai kualitas yang lebih baik dibanding limbah domestik. Kedua, semenjak gabung dengan WTO, Tiongkok mulai mengekspor komoditinya dengan menggunakan kapal – kapal konteiner, sehingga para pelaku industri melihat bahwa keuntungan ini akan memberikan peluang dalam menekan biaya impor dengan cara

mengisi limbah kapal konteiner kosong bekas ekspor yang akan kembali ke Tiongkok. *Ketiga*, tingginya faktor ekspor di Tiongkok.

**Grafik 2.** Produksi Sampah Tiongkok (dalam Juta Ton)

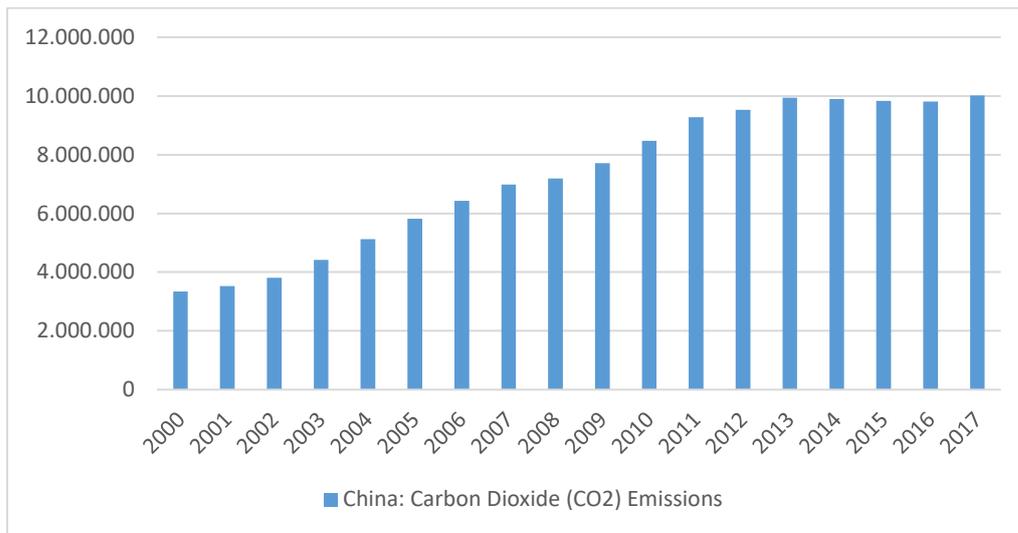


*Sumber: (Statista, 2019)*

Untuk dapat melihat alasan mengapa pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan *Operation National Sword*, di mana penulis menganalisa menggunakan konsep *human security* dengan komponen *environmental security*, *health security* dan *political security*. **Aspek pertama**, Permasalahan lingkungan. Degradasi lingkungan terjadi ketika pemerintah gagal menegakkan regulasi mengenai limbah yang diimpor tersebut. Disaat pemerintah gagal menegakkan regulasi tersebut, membuat limbah plastik tidak teruraikan secara benar maka degradasi lingkungan terjadi. Namun dengan meningkatnya impor limbah bahan baku tidak diiringi oleh regulasi mengenai daur ulang limbah. Sehingga hal tersebut menyebabkan ketegangan di masyarakat akibat adanya penyumbatan pada sistem drainase di beberapa kota di Tiongkok. Selain permasalahan penyumbatan drainase, ditemukan juga permasalahan lainnya dimana TPA yang berada di Tiongkok lebih memprioritaskan untuk melakukan daur ulang kembali sampah impor dibandingkan dengan sampah domestik, hal ini dikarenakan kapasitas penampungan sampah di Tiongkok hanya dapat melakukan daur ulang sebanyak 50% dari total produksi sampah yang ada di negara tersebut.

Selain adanya pencemaran tersebut, di Tiongkok sampah plastik juga ikut serta dalam memperparah pencemaran udara. Pengolahan sampah dengan cara pembakaran (*incinerator power plant*) sebabkan polusi udara. Pencemaran udara juga terjadi di Tiongkok sebagai dampak dari kebijakan impor limbah bahan baku, hal ini dikarenakan pengolahan sampah melalui pembakaran mengeluarkan residu (*fly ash*) dimana sangat beracun bagi tubuh manusia karena dapat menyebabkan kanker dan permasalahan kesehatan lainnya (EPA, 2007).

**Grafik 3.** Peningkatan Polusi Udara di Tiongkok



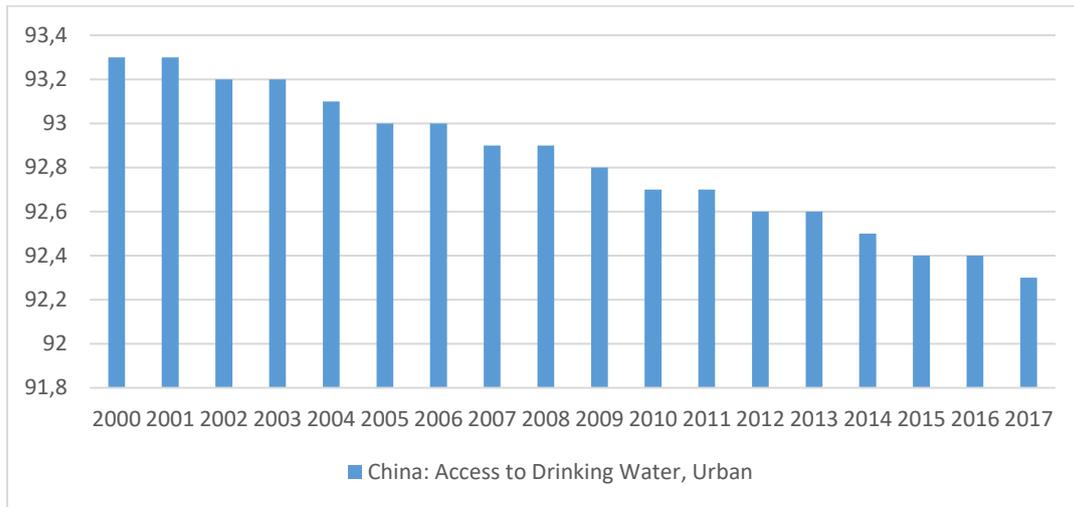
Sumber: (*The Global Economy, 2018*)

Seperti yang dijelaskan grafik 3, bahwa polusi udara terus bertambah dari tahun 2000 – 2017. Hal ini juga didasarkan pada pertumbuhan industri yang sangat pesat di Tiongkok, pertumbuhan tersebut diiringi dengan pembakaran limbah berbahaya. Sampah dari pembakaran tersebut dapat menjadi polutan yang menyebabkan hujan asam. Hujan asam dari pembakaran tersebut dapat masuk kedalam tanah, sehingga tanah yang tercemar mengandung kontaminan yang berpotensi mengganggu hasil produksi yang jika dikonsumsi akan berbahaya bagi manusia.

Peningkatan jumlah produksi sampah akibat kebijakan impor bahan baku yang dilakukan Tiongkok berdampak juga pada menurunnya tingkat presentase air bersih di negara tersebut. Selain itu akibat banyaknya sampah yang ditimbun di TPA telah menyebabkan polusi pada air bawah tanah (*groundwater*) Tiongkok. Terdapat setidaknya 96 jenis polutan yang telah berhasil diidentifikasi di air bawah tanah Tiongkok, yang dimana mayoritas sumber polutan tersebut berasal dari TPA (Han, et al., 2016).

Kebutuhan air minum bagi masyarakat Tiongkok sangat diperlukan, namun kebutuhan air minum tersebut didapatkan dari air bawah tanah, dimana terdapat 44 kota di Tiongkok dengan air minum yang memiliki kandungan kimia sebagai penyebab kanker. Menurut Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok, sejumlah 32,9 persen air di bawah tanah dikategorikan sebagai layak untuk kegiatan industri dan pertanian namun 47,3 persen dinyatakan tidak cocok untuk konsumsi manusia. Tidak hanya berhenti di air bawah tanah, berbagai jenis plastik ukuran mikro dan nano telah ditemukan pada ikan, kerang, dan bahkan garam laut yang dikonsumsi oleh warga Tiongkok. Hal tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit apabila dikonsumsi, dikarenakan didalam plastik terdapat beberapa zat kimia yang berbahaya.

**Grafik 4.** Presentase Akses Air Bersih di Tiongkok (Dalam Persen)



Sumber: (*The Global Economy*, 2017)

Telihat di grafik 4 bahwa terjadi tren yang menurun terhadap polusi air yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit bagi masyarakat Tiongkok. Hal ini terjadi bukan hanya dikarenakan air di bawah tanah, akan tetapi difaktori sampah-sampah juga mencemari beberapa sungai yang ada di Tiongkok, salah satunya Sungai Yangtze yang merupakan sungai paling besar dan paling kotor.

**Aspek Kedua,** Permasalahan kesehatan. Ancaman kesehatan dapat terjadi akibat adanya udara yang buruk. Penggunaan metode dalam pembakaran limbah yang tak bisa didaur ulang dapat menciptakan zat beracun sehingga jika dihirup dapat menyebabkan batuk, hilang ingatan, kanker paru-paru ataupun gangguan pernapasan. Tercatat dalam data satelit mengenai implikasi polusi udara akibat pembakaran limbah bahwa lebih dari 400.000 orang di Tiongkok mengalami kematian prematur per tahun akibat polusi udara *Global Alliance on Health and Pollution (GAHP)* juga menganalisis dari tahun 2015 sampai 2017, di mana Tiongkok merupakan negara ke dua (2) setelah India dari sepuluh negara teratas dalam total kematian prematur akibat polusi yaitu 1,865,566 Jiwa, dengan kematian terbesar akibat polusi udara sebanyak 1,242,987 jiwa (GAHP, 2019). Sebuah survey yang dilakukan pada tahun 2000 dan 2001 di Beijing, Shenzhen, Shanghai dan Guangzhou menjelaskan bahwa sekitar 20% anak – anak di daerah Beijing, 60% anak – anak di daerah Shenzhen, 50% anak – anak di daerah Shanghai dan 80% anak – anak di daerah Guangzhou mengalami gangguan kesehatan akibat dampak polusi yang terjadi (Economy, 2004).

Selain itu, industri limbah bahan baku juga berkontribusi dalam pencemaran air. Pencemaran air membuat banyak warga Tiongkok yang terkena penyakit akibat terkontaminasi racun *microcystin*, racun tersebut dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terserang penyakit kanker. Tercemarnya air yang terjadi akibat kurangnya sumber air bersih di negara tirai bambu tersebut. Menurut *Global Alliance on Health and Pollution (GAHP)* terdapat kematian akibat polusi air sebanyak 9,585 jiwa. Meskipun masyarakat Tiongkok mengetahui mengenai pencemaran air tersebut, namun hal ini terpaksa mereka lakukan dikarenakan air merupakan bagian penting dalam kebutuhan sehari – hari, seperti dimasak, mandi, mencuci maupun diminum. Walaupun mengonsumsi air yang tercemar bisa sebabkan bermacam penyakit seperti, disentri, kolera diare atau bahkan kematian.

Selain itu, pencemaran air yang terjadi juga berdampak pada pencemaran pada tanah. Tanah yang tak terkena langsung bisa terkontaminasi akibat dampak pencemaran lingkungan lainnya, misalnya air hujan maupun dari udara. Hal tersebut dapat menyebabkan tanah yang tercemar mengandung kontaminan. Tanah yang tercemar dapat berpotensi mengganggu hasil produksi dan apabila dikonsumsi akan berbahaya bagi manusia yang bisa merusak saraf, sistem reproduksi dan ginjal, dan juga menyebabkan komplikasi kesehatan lainnya, khususnya pada anak-anak. Pada tahun 2011, Kepala Insinyur Kementerian Perlindungan Lingkungan, Wan Bentai menjelaskan bahwa terdapat sekitar 10% tanah pertanian yang mengalami masalah akibat polutan, akibat air yang terkontaminasi dan limbah beracun yang merembes ke dalam tanah. Hal ini akan berdampak pada sektor pertanian salah satunya di pedesaan, dikarenakan pertanian merupakan sumber utama bagi masyarakat sekitar.

**Aspek ketiga**, permasalahan politik. Menurut UNDP mengenai dimensi keamanan politik dijelaskan bahwa ancaman hadir ketika terjadinya pelanggaran HAM dan terjadinya represi yang dilakukan negara. Ketika dampak dari polusi yang terjadi di Tiongkok semakin parah yang kemudian berujung pada aksi protes warga terhadap pemerintahnya, sehingga dengan aksi demonstrasi yang dilakukan menimbulkan sikap represif dari pemerintah yang menghadirkan beberapa pelanggaran HAM oleh negara.

Ketika terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Wuhan sebanyak 300.000 orang dan Qingyuan sebanyak 100.000 orang terkait rencana pembangunan pabrik insinerator yang dilakukan oleh Tiongkok yang dapat membahayakan masyarakat sekitar akibat pembakaran sampah yang dilakukan. Sehingga, hal semacam ini membuat kemarahan warga, dikarenakan ketidakpercayaan warga dengan pemerintah mengenai pabrik insinerator sebelumnya sehingga menyebabkan kekhawatiran akan pabrik yang direncanakan memiliki kualitas buruk sehingga dapat mengeluarkan dioksin yang sangat beracun dan dapat merusak kekebalan tubuh sehingga menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan adanya demonstrasi tersebut, pemerintah Tiongkok tampaknya mencoba meredam kemarahan warganya dengan menurunkan polisi yang berada di jalanan. Puluhan polisi anti huru hara dengan helm, perisai dan pentungan, yang kemudian memukul terlebih dahulu para demonstran beberapa diantaranya terluka di kepala kemudian menembakkan gas air mata ke kerumunan serta menangkap pengunjuk rasa secara massal (Lok-to & Wenqi, 2017). Kebrutalan aparat keamanan dalam menanggapi protes yang terjadi mendapat kecaman dari masyarakat Tiongkok.

Sehingga dengan adanya permasalahan yang terjadi akibat impor limbah bahan baku yang dilakukan pemerintah Tiongkok kemudian mengkaji dan mengeluarkan kebijakan *National Sword*. Pemerintah Tiongkok kemudian mulai menyadari betapa pentingnya permasalahan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan *Operation National Sword* sebagai reaksi dari permasalahan ekologis dan kesehatan sebelumnya. Pada bulan Juli 2017, Pemerintah Tiongkok menyampaikan bahwa;

*“Masuknya impor limbah sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan ekologi negara kita. ... Terbentuknya Kebijakan ini akan meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan ekologi nasional dan kesehatan masyarakat. ... Kami akan secara bertahap mengisi kesenjangan sumber daya domestik dan memberikan jaminan yang kuat untuk membangun Cina yang indah dan membangun masyarakat yang makmur secara menyeluruh (The Chinese Central Government's, 2017).”*

Sebuah langkah – langkah praktis namun memiliki efek yang besar yang diambil dalam memenuhi permasalahan tersebut yaitu terbentuknya kebijakan tegas *Operation National Sword*. Terbukti, Kebijakan berhasil menurunkan jumlah angka limbah impor yang masuk, dari 600.000 ton/bulan di tahun 2016 jadi 30.000 ton/bulan terhitung dari awal tahun 2018 ketika kebijakan ini dibentuk (Greenpeace, 2019). Kebijakan ini merupakan impian dari kebangkitan pemerintah Tiongkok yang diusulkan oleh Xi Jinping selaku Presiden Tiongkok, yaitu agar 1,3 miliar masyarakat Tiongkok hidup bahagia. Dengan kata lain, semua masyarakat memiliki hak dan berhak untuk hidup bermartabat dalam lingkungan yang aman. ini sejalan dengan gagasan *human security* yang dilakukan secara luas. Misalnya, keduanya menekankan pada individu dan kebahagiaannya, dan ini harus dipenuhi bersama dengan pembangunan nasional.

Kebijakan *National Sword* juga sejalan dengan gagasan *peaceful development*. Strategi ini bertujuan dalam meningkatkan perdamaian, Tiongkok berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan negara – negara di dunia (Bijian, 2013).

Dalam *peaceful development* terdapat penerbitan *white paper* yang berisi:

- I. Pembangunan Damai Adalah Jalan Tak Terelakkan untuk Modernisasi Tiongkok
- II. Mempromosikan Perdamaian dan Pembangunan Dunia dengan Pertumbuhan Tiongkok
- III. Berkembang dengan Mengandalkan Kekuatan, Reformasi, dan Inovasi Sendiri
- IV. Mencari Saling Menguntungkan dan Pembangunan Bersama dengan Negara Lain
- V. Membangun Dunia yang Harmonis untuk Perdamaian Berkelanjutan dan Kemakmuran Bersama (China, 2005).

Tiongkok menginginkan citra *peaceful development* dengan menjadi negara yang damai dan bersahabat dalam perkembangannya sehingga Tiongkok menjadi negara yang dapat dipercaya serta menganut *win – win solution* dalam membentuk relasi dengan negara di dunia (china.org). Berdasarkan poin V, pengembangan ilmiah dalam pembangunan ekonomi dan sosial dimana pemerintah Tiongkok menjadikan rakyat sebagai fokus utama, hal ini dilihat dari pemerintah Tiongkok yang dengan begitu cepat mempromosikan kebangkitan infrastruktur dalam mempromosikan kemakmuran bagi rakyat Tiongkok. Kerja sama ini akan menguntungkan serta dapat memecahkan masalah besar yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia dan keberlangsungan hidup manusia.

Tiongkok memainkan peran penting dalam menjaga perdamaian dan menghadapi tantangan dunia. Bagaimana Tiongkok kemudian mencoba untuk menghilangkan hambatan dalam sumber daya dan lingkungan menjadi hambatan dalam pembangunan, sehingga perlunya pendekatan pembangunan hijau. Di masa depan Tiongkok memiliki harapan besar dalam mengadopsi pemikiran *peaceful development* dalam menciptakan pembangunan yang damai di dunia Internasional. Pentingnya isu lingkungan dan sadarnya pemerintah Tiongkok mengenai kesehatan warganya. Kebijakan *National Sword* merupakan salah satu jalan dalam terwujudnya *peaceful development* dalam mencapai kemakmuran bagi rakyat sehingga permasalahan dalam ancaman ekologis yang berakibat pada masyarakatnya sedikit – mulai sedikit dapat teratasi. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari diplomasi Tiongkok dalam tercapainya *peaceful*.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan *National Sword* merupakan sebuah reaksi dari permasalahan yang terjadi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang kuat dalam membangun masyarakat yang

makmur di negara Tiongkok. Sehingga, kebijakan ini sejalan dengan konsep *human security* yaitu dapat menciptakan kebebasan dan keamanan dari ketakutan serta meraih kesejahteraan pada kehidupan manusia, baik rasa aman dari ancaman bahaya kronis maupun perlindungan dari gangguan kekacauan yang tidak diduga dan menyakitkan. Kebijakan *National Sword* berusaha untuk menjadikan masyarakat Tiongkok bebas *freedom from fear* yang diartikan sebagai kebebasan masyarakat dari ancaman yang bersifat fisik dan *freedom from want* yang diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap individu untuk memenuhi kebutuhan mereka baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Peneliti juga melihat bahwa kebijakan *national sword* juga sejalan dengan gagasan *peaceful development* yaitu menekankan pentingnya membangun masyarakat yang harmonis; secara eksternal, pemerintah Tiongkok secara aktif mempromosikan lingkungan internasional yang damai melalui diplomasi aktif dengan melakukan kerja sama mengenai lingkungan dan pembangunan dengan negara – negara lain dan organisasi internasional sehingga dengan melakukan kerja sama tersebut permasalahan ancaman ekologis yang berakibat pada masyarakatnya sedikit – mulai sedikit dapat teratasi. Dengan begitu, pemerintah dapat mewujudkan konsep dari *human security* dan terciptanya 2 komponen utama yakni *freedom from fear* dan *freedom from want* akibat terbentuknya kebijakan *National Sword*. Hal ini menjelaskan bahwa konsep ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan dan Tiongkok mengikuti dan melaksanakan ketiga komponen tersebut.

## REFERENSI

- Asbiantari, D. R., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2016). Effect of Export on Indonesian's Economic Growth. *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 15.
- Bijian, Z. (2013, April 15). China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status. *Council on Foreign Relations Stable*, 21. Retrieved from jstor.org: <http://www.jstor.org/stable/20031702>
- Brooks, A. L., Wang, S., & Jambeck, J. (2018). The Chinese Import Ban and Its Impact on Global Plastic Waste Trade. *Research Article*, 3.
- China, T. S. (2005, December 22). *China's Peaceful Development Road*. Retrieved from People.com: [http://en.people.cn/200512/22/eng20051222\\_230059.html](http://en.people.cn/200512/22/eng20051222_230059.html)
- china.org. (n.d.). *White Paper on Peaceful Development Road*.
- Economy, E. C. (2004). The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future. In C. Zheng, "*Children Have too. Much Lead in Their Bloodstreams* (p. 85). Ithaca & London: Cornell University Press.
- EPA. (2007). *Human and Ecological Risk Assessment of Coal Combustion Wastes*. RTI International.
- GAHP. (2019). *Global, Regional, and Country Analysis*. Retrieved from [https://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12\\_18\\_2019.pdf](https://gahp.net/wp-content/uploads/2019/12/PollutionandHealthMetrics-final-12_18_2019.pdf)
- Greenpeace. (2019, April 23). Data From the Global Plastics Waste Trade 2016-2018 And the Offshore Impact of China's Foreign Waste Import Ban. *GreenPeace*, p. 5.
- Juan, S. (2016, October 17). *Cancer agent found in 44 cities' drinking water*. Retrieved June 18, 2020, from China Daily: [https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/17/content\\_27077599.htm](https://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/17/content_27077599.htm)

- Nugraha, R. (2019, Juli 05). *Kenapa Indonesia Tergiur Impor Sampah Asing?* Retrieved from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tergiur-impor-sampah-asing/a-49480002>
- Ritchie, M. (2018, April 16). *China National Sword: The role of Federal Government. MRA Consulting Group, 5.*
- Statista. (2019, December 10). *Amount of disposed waste in China 1990-2018.* Retrieved June 18, 2020, from Statista: <https://www.statista.com/statistics/279117/amount-of-disposed-garbage-in-china/>
- The Chinese Central Government's. (2017). *国务院办公厅关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的通知.* Beijing: 国务院办公厅. Retrieved from [http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/27/content\\_5213738.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/27/content_5213738.htm)
- The Global Economy. (2017, December 31). *China: Access to Drinking Water, Urban.* Retrieved June 18, 2020, from The Global Economy: [https://www.theglobaleconomy.com/China/drinking\\_water\\_urban/](https://www.theglobaleconomy.com/China/drinking_water_urban/)
- The Global Economy. (2018, December 31). *China: Carbon Dioxide (CO2) Emissions.* Retrieved June 18, 2020, from The Global Economy: [https://www.theglobaleconomy.com/China/Carbon\\_dioxide\\_emissions/](https://www.theglobaleconomy.com/China/Carbon_dioxide_emissions/)
- World Integrate Trade Solution. (2018, November 12). *China Textiles and Clothing Exports By Country and Region.* Retrieved June 15, 2020, from World Integrate Trade Solution: [https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-63\\_TextCloth](https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/Year/2016/TradeFlow/Export/Partner/all/Product/50-63_TextCloth)